BAB II

LANDASAN TEORI

A. Money Politic

1. Definisi *Money Politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.[1] Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.[2]

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.[3]

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.[4]

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya

---

[1] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.
[2] Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, Http:// Www.Panwaslu, Jum'at.
[3] Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.
[4] Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya denga cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

2. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut:[5]

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.[6]

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader

[5] Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.
[6]Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.[7] Bantuan Langsung (*Sembako Politik*). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Contoh nyata dari *Sembako Politik* adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.[8] Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian "berkah". Politik pencitraan dan tebar pesona melalui "*jariyah politis*" ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

---

[7]L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.
[8] Wikipedia, "Politik Uang" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik uang (20 Maret 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

3. Strategi *Money Politic*

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *money politic*, sebagai berikut:[9]

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

[9] Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:[10]

[10] Hasunacha N, "*Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*", http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu (Diakses 20 April 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

B. Pemilih Pemula

1. Definisi Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.[11] Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Para pemilih merupakan rational voters yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan

[11] Pahmi sy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri traditional voters yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari swinger voters yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya.

Pemilih yang didalamnya pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan objek mobilisasi. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilih, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin,[12] kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.[13]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilih.
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1 dan 2) Tentang pemilih yang mempunyai hak memilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Riswanda Imawan, Pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama kali akan ikut dalam pemilu.[14] Pemilih pemula juga dianggap menjadi "ladang emas" suara bagi keseluruhan partai politik ataupun seorang kandidat pada pemilu. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namum mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain.[15]

Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan

[14] Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar "anggota IKAPI",1997), 67.
[15] Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilu Untuk Pemula tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target partai politik.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif rasional, haus akan perubahan, dan tipis akan kadar populasi pragmatisme. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing vooters* yang sesungguhnya.[16] Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disampimg mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling

[16]Litbang Kompas/Gianie, "Memetakan Minat Pemilih Pemula", (Online: www.Indonesiamemilih.com).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.[17]

Pemilih pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilih yang berusia 17 tahun hingga 21 tahun atau pemilih yang baru akan memulai pengalaman pertama kali di dalam mencoblos pada pemilu serta yang berdomisili di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.

2. Syarat-Syarat Pemilih Pemula

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/ sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian)
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
6. Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Pemilih pemula dalam hal ini memiliki KTP serta berdomisili di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk mengikuti pemilihan Presiden 2014.

[17] Suhartono, "*Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education* (*Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat*)", (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Pemilih Pemula Dalam Mengenal Politik

Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan dalam mengenal politik dengan melalui berbagai cara, yaitu: *pertama*, keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orangtua bisa membentuk perilaku pemilih mereka. *Kedua*, teman sebaya atau per group. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Dan *Ketiga*, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik). Dapat juga berupa spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

C. Perilaku Pemilih

1. Definisi Perilaku memilih

Pemilih diartikan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan kemudian memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.[18] Dinyatakan sebagai pemilih yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih atau mereka yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin.

Adapun perilaku memilih menurut Surbakti adalah: "Akivitas pemberian suara oleh individu yang bekaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum secara langsung.[19] Bila voters atau pemilih memutuskan untuk memilih (to vote) maka, pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu". Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon kandidat tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku memilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi

---

[18] Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 102.
[19] Ramlan Surbakti, *Partai*, *Pemilu* dan *Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengelompokkan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Perilaku memilih disini yaitu aktivitas pemberian suara pada para pasangan calon Presiden yang dilakukan oleh pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, untuk memilih atau tidak memilih pada pemilihan Presiden 2014.

2. Tipologi Perilaku Pemilih

Untuk mengetahui jenis pemilih, berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis pemilih:[20]

a. Pemilih Rasional

Pemilih rasional ini memiliki kemampuan orientasi yang tinggi terhadap "*policy problem solving*" dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor

[20] Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 120-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikologis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/ kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem ideologi partai dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini harus di manage sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dll dianggap sebagai prioritas kedua.

Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konserfatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dilakukan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih skeptis

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi daerah/ negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional menurut James S, Coleman diartikan sebagai tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan.

Teori ini memusatkan perhatian pada aktor. Aktor tersebut dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.[21]

Teori pilihan rasional Coleman terlihat bahwa pada dasarnya tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

[21]George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Colemen menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial:

> Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang faktor, masing-masing mengendalikan sumberdaya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumberdaya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan... terlibat dalam sistem tindakan... selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistematik terhadap tindakan mereka.

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berprilaku rasional, namun ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh terhadap teorinya. Pemusatan perhatian pada tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan prilaku sistem sosial. Meski seimbang, namun setidaknya ada tiga kelemahan pendekatan Colemans. *Pertama*, ia memberikan prioritas perhatian yang berlebihan terhadap masalah hubungan mikro dan makro dan dengan demikian memberikan sedikit perhatian terhadap hubungan lain. *Kedua*, ia mengabaikan masalah hubungan makro-makro. *Ketiga*, hubungan sebab akibatnya hanya menunjuk pada satu arah, dengan kata lain ia mengabaikan hubungan dealiktika dikalangan dan di antara fenomena mikro dan makro.

Inti dari penjelasan teori pilihan rasional adalah bahwa pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional bila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan, keyakinan, yaitu dalam artian bahwa tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan keyakinan yang ia miliki dan dibuktikan secara ex ente dan bukan secara ex post (karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna, sehingga orang rasional tetap bisa melakukan kesalahan secara ex post (yaitu ketika dibandingkan dengan hasil nyatanya) biarpun secara ex ente, yaitu sebelum dampaknya diketahui, keputusannya sudah rasional). Keyakinan akan dikatakan bila sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan adalah rasional, kita harus menunjukkan sebuah deret dimana tindakan tersebut dipandang sebagai terberi (given) tapi segala sesuatu yang lain harus dibenarkan atau dicarikan alasannya (yaitu penjelasan mengapa individu mengambil tindakan tertentu, mengapa individu memiliki keyakinan tertentu).

Asumsinya bahwasanya aktor dimaksudkan *money politic*. *Money politic* yang sebagian besar dilakukan oleh tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, serta partai politik usungan para kandidat pemilihan umum (pemilu). Sedangkan tujuan dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat khususnya pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum (pemilu), khususnya Pemilihan Presiden 2014. Hal tersebut bersifat timbal balik untuk mendapatkan keuntungan, baik aktor maupun tujuan. Dalam hal ini, saat aktor mendistribusikan berupa uang tunai/ barang serta fasilitas umum yang disebut juga hadiah atau membayar pemilih kepada pemilih sesungguhnya beberapa pemilih mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi sehingga membuat para penerima untuk memberikan pembalasan berupa hak pilihnya saat pemilihan umum (pemilu), khususnya Pemilihan Presiden 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Berfikir

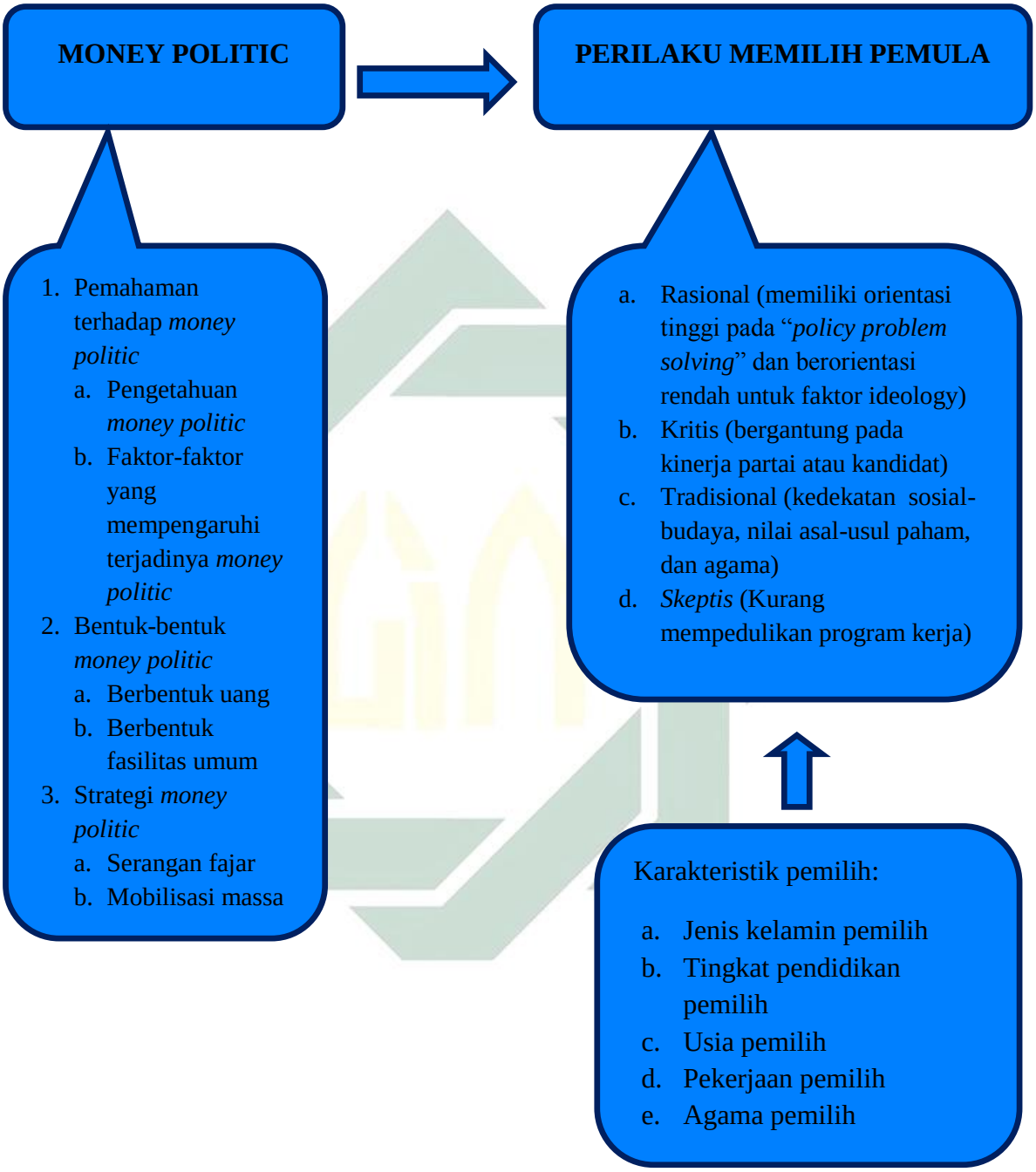

Berdasarkan hal diatas, diasumsikan bahwasanya marak terjadinya *money politic* telah banyak mempengaruhi masyarakat yang acuh dengan pemilu sehingga mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa pemberian itu sebenarnya akan merugikan diri mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Oleh karena itu sangat diperlukan pembelajaran tentang pengetahuan politik khususnya pengetahuan *money politic* dalam pemilu. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *money politic*, yaitu: kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, serta kebudayaan. *Money politic* yang dilakukan berbentuk, seperti: berbentuk uang dan barang, serta berbentuk fasilitas umum. Sedangkan strategi yang digunakan adalah Serangan fajar dan mobilisasi Massa. Dan pemilih pemula adalah pemilih yang sama sekali tidak pernah atau mempunyai pengalaman dalam mencoblos atau memilih dalam pemilihan umum, maka disini *money politic* dapat dijadikan tolak ukur terhadap perilaku pemilih baik rasional, kritis, tradisional ataupun skeptis dalam pemilu. Perilaku pemilih tersebut juga bisa dipengaruhi oleh karakteristik pemilih, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, maupun agama.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penulisan, dimana rumusan penulisan, telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teoi yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data-data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang empiric.[22] Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu:

[22] Sogiono, *Metode Penelitian Kmbinasi (Mixwd Methodes),* (Bandung: Alfabeta, 2010), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ho (H nol), yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.
2. Hipotesis alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan

Berdasakan pemaparan yang sudah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- Pengaruh *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.

  Ha = Ada pengaruh positif yang signifikan antara *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan presiden 2014.

  Ho = Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id